

ABSTRAK

Jabatan Notaris merupakan jabatan umum yang amanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis, baik terhadap akta yang dibuat oleh Notaris maupun dibuat di hadapan Notaris. Dalam proses pembuatan akta, notaris mengkonstatir keterangan-keterangan penghadap yang ingin dituangkan ke dalam akta. Selain itu, notaris juga memerlukan dokumen dan surat yang terkait dengan isi akta sebagai dasar yuridis formil akta. Akan tetapi tidak jarang notaris ikut dipermasalahakan dan diminta pertanggungjawaban terkait dengan akta otentik. Salah satu sumber permasalahannya adalah dokumen dan surat yang disampaikan oleh penghadap adalah surat palsu. Oleh karena itu dipandang perlu adanya penelitian terkait dengan pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan akta berdasarkan surat palsu yang disampaikan oleh penghadap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan akta berdasarkan surat palsu yang disampaikan oleh penghadap; untuk mengetahui hambatan notaris dalam mengidentifikasi kebenaran surat atau dokumen yang di disampaikan oleh penghadap; untuk mengetahui perlindungan hukum notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan kebenaran surat atau dokumen yang di disampaikan oleh penghadap.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan penelitian lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan dengan narasumber yaitu 03 (tiga) Notaris di Kota Kendari, dan data-data pendukung yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan Peneliti adalah wawancara, dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notaris hanya bertanggung jawab secara formil dan tidak mempunyai kewajiban membuktikan secara materil terhadap kebenaran dokumen yang diperlihatkan penghadap. Notaris hanya dapat diminta pertanggungjawaban jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 84 dan 85 UUJN dan kode etik notaris, yang mana dapat diminta bertanggung jawab secara pidana, perdata, dan administrasi. Hambatan dapat berupa : ketidakjujuran penghadap atas kebenaran informasi dan/atau dokumen yang disampaikan; rekayasa teknologi melalui scanning dan editing dokumen yang disampaikan, tuntutan klien agar penyelesaian akta terselesaikan dengan cepat, kurangnya penggalan informasi/keterangan dari notaris kepada penghadap; tingginya kuantitas pekerjaan notaris yang menyebabkan ketidaktepatan dalam pembuatan akta, dan kedekatan emosional notaris dengan penghadap. Perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan kebenaran dokumen yang disampaikan oleh penghadap antara lain : Perlindungan Hukum Prefentif, yaitu : Notaris menjalankan jabatannya dengan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kode etik notaris; Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan rutin dari majelis kehormatan notaris. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu : perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal terjadi kasus atau pihak yang melaporkan notaris atas dugaan pelanggaran hukum dalam akta yang dibuat dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang mana untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Kata Kunci : Pertanggungwaban, Akta Notaris, Surat Palsu.

ABSTRACT

The position of Notary is a public position mandated by laws and regulations with the aim of assisting the public in making authentic deeds as written evidence, both for deeds made by Notaries or made before a Notary. In the process of making the deed, the notary constricts the statements of the party that want to be included in the deed. In addition, notaries also need documents and letters related to the contents of the deed as the formal legal basis for the deed. However, it is not uncommon for notaries to be questioned and held accountable for authentic deeds. One of the sources of the problem is that the documents and letters submitted by the tappers are fake letters. Therefore it is deemed necessary to have research related to the accountability of notaries for making deeds based on fake letters submitted by the tappers.

This study aims to determine the form of notary accountability for deeds based on fake letters submitted by the tappers; to find out the obstacles of the notary in identifying the correctness of the letter or document submitted by the tapper; to find out the legal protection of notaries in carrying out their positions related to the correctness of the letters or documents submitted by the tappers.

The type of research used in this research is juridical empirical research, which is research that is carried out by examining the applicable legal provisions and what happens in society. This research approach method is a sociological and statutory approach. The data in this study are library data and field research. The data were obtained from interviews and with sources, namely 03 (three) Notaries in Kendari City, and supporting data obtained through literature and document studies. The data collection techniques that the researcher will use are interviews and document studies.

The results of this study indicate that the notary is only formally responsible and has no obligation to materially prove the correctness of the documents shown by the interlocutors. Notaries can only be held accountable if the Notary is proven to have committed a violation as stipulated in Articles 84 and 85 of the UUJN and the notary's code of ethics, which can be held responsible criminally, civil and administratively. Barriers can be in the form of: dishonesty in the correctness of information and / or documents submitted; technological engineering through scanning and editing of submitted documents, client demands for resolving the deed quickly, lack of extracting information / information from the notary to the parties; the high quantity of notary work which causes inaccuracy in making deeds, and the emotional closeness of the notary to the tappers. Legal protection for notaries in carrying out their positions related to the correctness of documents submitted by the tappers include: Preventive Legal Protection, namely: Notaries carry out their positions based on statutory regulations and the notary's code of ethics; Supervision and routine examination of the notary honor council. Meanwhile, repressive legal protection, namely: legal protection for notaries in the event of a case or party reporting a notary on an alleged violation of the law in a deed made with the approval of the Notary Honorary Council which is for the benefit of the judicial process, the investigation of public prosecutors or judges with the approval of the Notary Honorary Council.

Keywords: Liability, Notary Deed, Fake Letters.